

manual. Hal ini menunjukkan pemanfaatan ICT di era milenial ini, masih belum bisa *fit and proper* untuk diterapkan di seluruh aspek pemerintahan, khususnya dalam urusan pemilu. Problem empiris ini menjadi menarik untuk digali lebih lanjut terkait dengan adanya sikap ambivalensi dalam pemanfaatan ICT.

Demikian juga dengan pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada Pilkada Serentak Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyediakan Sidalih sebagai sarana untuk memastikan validitas data pemilih. Sidalih memberi ruang kepada masyarakat untuk mengecek kebenaran data secara *online* melalui alamat <http://data.kpu.go.id> , dan kemudian apabila ditemui data yang *invalid* dapat mengusulkan perbaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau langsung menginformasikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Semakin valid proses pemutakhiran data pemilih maka jumlah daftar pemilih tambahan akan semakin kecil. Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemudian dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1) atau Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2)

bagi pemilih yang menggunakan KTP pada hari H. Jika dilihat dari segi angka, jumlah DPTb1 maupun atau DPTb2, prosentasenya sangat kecil. Meskipun demikian, karena menyangkut hak konstitusi pemilih, maka seberapapun jumlahnya patut untuk mendapat perhatian (Haris 2013). Hal ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih termasuk pemanfaatan Sidalih oleh masyarakat belum optimal, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Tabel 1. 1 Jumlah DPT, DPTB1 & DPTB2

NO	DATA PEMILIH	L	P	TOTAL
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	337.716	353.729	691.445
2	Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb 1)	376	470	846
3	Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb 2)	1.279	1.785	3.064

Sumber : KPU Bantul (2015)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna Internet

di Indonesia pada Tahun 2016 sejumlah 132.7 Juta orang. Angka tersebut setara dengan 51% jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 Juta orang. Pengguna di tahun 2016 meningkat sangat signifikan sebesar 49,2 juta sejak tahun 2014 atau naik 55% dalam kurun waktu 2 tahun saja.



Gambar 1. 1 Komposisi Pengguna Internet Indonesia.

Berbeda dengan data APJII, eMarketer.com pada tahun 2016, mengeluarkan data pengguna internet di Indonesia sejumlah 102,8 juta, mencapai peringkat 6 dunia. Namun sejak tahun 2017 naik ke peringkat 5 menggeser posisi Jepang dengan jumlah pengguna pada tahun 2017 sebesar 112.6 juta. Terlepas dari perbedaan data

yang ada, Indonesia merupakan pangsa pasar potensial, dimana lebih dari separoh penduduknya memanfaatkan ICT secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, jumlah pengguna yang ada, 53,6% nya adalah berada di usia produktif antara 25-44 tahun, yang pada saat yang sama juga telah memiliki hak pilih.

Beberapa peneliti telah melakukan studi tentang *e-government adoption* yang secara umum terbagi menjadi beberapa tema besar. Pertama berkaitan dengan *organizational transformation process*, dimana kehadiran ICT memberi dampak pada perubahan berorganisasi secara internal maupun pola interaksi antar individu di dalamnya maupun dalam cara memberikan pelayanan kepada publik (Zammuto et al. 2007; Aichholzer dan Schmutzer 2000; Nurmandi et al. 2017; Supardal et al. 2017). Kedua, *user behavior* berhubungan dengan persepsi atas e-government oleh pengguna yang sudah aktif menggunakan *e-government*, baik yang bersifat *voluntary* yakni masyarakat umum (Abu-shanab 2014; Rana dan Dwivedi 2015; Aditiawarman et al. 2014; Dwivedi et al. 2017) atau yang bersifat *mandatory* yakni pegawai pemerintah (Batara et al. 2017; Venkatesh 2000; Venkatesh dan Davis 2000). Dan ketiga,

non-user behavior, yakni berkaitan dengan pengguna yang belum memutuskan untuk menggunakan *e-government* (Seo dan Bernsen 2016; Mpinganjira 2015). Dari ketiga kategori diatas studi tentang *non user behavior* masih relative terbatas (lihat Lampiran 1).

Sementara itu studi terkait dengan ICT dan *election* khususnya terkait dengan *voter registration* juga masih relatif terbatas. Studi yang membahas tentang pemilihan, biasanya masih berhubungan dengan tahapan penyelenggaraan secara umum seperti yang berkaitan dengan sistem pemilu dan demokrasi (Kimura 2009, 2015; Krimmer 2014; Husein 2014), partisipasi pemilih (*voter turnout*) (Edelmann, Krimmer, dan Parycek 2008; KPU 2015; Martinez dan Trinh 2017; Suranto, Sulaksono, dan Murti 2015) serta pelanggaran pemilu (*electoral malpractice*) (Qodir 2016; Aspinall dan Sukmajati 2015; Sri Nuryanti 2017; Allen 2014).

Seiring dengan pemanfaatan ICT dalam e-goverment, teori atau model mengenai sikap (*attitude*) dan penerimaan (*acceptance*) terhadap ICT juga mengalami perkembangan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi secara umum serta faktor pendukung maupun penghambat terhadap proses penerimaan

terhadap penggunaan teknologi (Kripanont 2007). *E-government Adoption* merupakan konstruksi psikologis seseorang untuk menerima atau menolak kehadiran teknologi berbasis computer dalam penyampaian informasi dan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat melalui jaringan internet ataupun sarana digital yang lain. (Gattiker dan Larwood 1986; Muir dan Oppenheim 2002; Beldad et al. 2012).

Secara umum konsep dasar dari berbagai teori *E-government Adoption* adalah reaksi individu (*individual reaction*) untuk menggunakan ICT sebagai variabel independen, kemudian niat (*behavioral intention*) untuk menggunakan ICT sebagai variabel perantara, dan penggunaan ICT (*actual use*) sebagai variabel independen (Venkatesh et al. 2003).

Sejumlah model telah diteliti dikembangkan oleh para *scholar* untuk dapat mengetahui lebih lanjut hal-hal yang menjadi alasan individu untuk menerima dan menggunakan teknologi serta untuk mengetahui faktor apa saja yang memiliki pengaruh yang signifikan (lihat tabel 1.2). Komponen dalam model atau teori-teori

psikologi termasuk dalam teori atau model penerimaan ICT lebih sering disebut menggunakan istilah *construct* daripada *variabel*.

Tabel 1. 2 Teori *E-Government Adoption*

NO	TEORI / MODEL	CONSTRUCT – (<i>adopsi / modifikasi / sintesa dari</i>)
1	Theory of Reasoned Action (TRA)	<i>Attitude Toward Behavior. Subjective Norm.</i>
2	Theory of Planned Behaviour (TPB)	<i>Attitude Toward Behavior (TRA). Subjective Norm (TRA). Perceived Behavioral Control.</i>
3	Technology Acceptance Model (TAM)	<i>Subjective Norm (TRA). Perceived Usefulness. Perceived Ease of Use.</i>
4	Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB)	<i>Attitude Toward Behavior (TPB). Subjective Norm (TPB). Perceived Behavioral Control (TPB). Perceived Usefulness (TAM).</i>
5	Motivational Model (MM)	<i>Extrinsic Motivation. Intrinsic Motivation.</i>
6	IS Success Model (D&M)	<i>System quality. Information quality.</i>
7	TAMExtension (TAME)	<i>Attitude (TPB). Intrinsic involvement (MM). Perceived usefulness (TAM). Situational involvement.</i>
8	Social Cognitive Theory (SCT)	<i>Outcome Expectations Performance. Outcome Expectations Personal. Self-efficacy. Affect. Anxiety.</i>
9	Model of PC Utilization (MPCU)	<i>Job-Fit. Complexity. Long-term Consequences. Affect Towards</i>

NO	TEORI / MODEL	<i>CONSTRUCT – (adopsi / modifikasi / sintesa dari)</i>
		<i>Use. Social Factors. Facilitating Conditions.</i>
10	Decomposed Theory of Planned Behaviour (DTPB)	<i>Attitude (TRA/TAM). Subjective norm (TPB). Perceived behavioral control (TAM). Perceived ease of use (TAM). Perceived usefulness (TAM). Compatibility (IDT). Resource facilitating conditions (MPCU). Technology facilitating condition (MPCU). Self-efficacy (SCT).</i>
11	Extension of Technology Acceptance Model (TAM2)	<i>Image diadopsi dari IDT. Perceived usefulness diadopsi dari TAM. Perceived ease of use diadopsi dari TAM. Job relevance dimodifikasi dari MPCU. Result demonstrability diadopsi dari IDT. Subjective norm diadopsi dari TPB.</i>
12	Diffusion of Innovation Model (DOI) / Innovation Diffusion Theory (IDT)	<i>Relative Advantage. Ease of Use. Image. Compatibility. Results Demonstrability. Voluntariness of Use. Visibility.</i>
13	Extension of Technology Acceptance Model (TAM 3)	<i>Perceived usefulness (TAM). Perceived ease of use (TAM). Subjective norm (TPB). Image (IDT). Job relevance (MPCU). Result demonstrability (IDT). Computer self-efficacy (SCT). Computer anxiety (SCT). Output quality. Computer playfulness. Perceived enjoyment. Perceptions of external control. Objective usability.</i>

NO	TEORI / MODEL	<i>CONSTRUCT – (adopsi / modifikasi / sintesa dari)</i>
14	Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)	<i>Performance expectancy. Effort expectancy. Social influence. Facilitating conditions. (Sintesa dari TRA, TPB, TAM, MPCU, MM, SCT, TAM 2 dan DOI/IDT.)</i>
15	Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2)	<i>Performance expectancy (UTAUT). Effort expectancy (UTAUT). Social influence (UTAUT). Facilitating conditions (UTAUT). Hedonic motivation. Price value. Habit.</i>
16	Unified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA)	<i>Performance expectancy (UTAUT). Effort expectancy (UTAUT). Social influence (UTAUT). Facilitating conditions (UTAUT). Attitude (TRA). Perceived Risk.</i>
17	E-Government Adoption Model (GAM)	<i>Availability of Resources (MPCU). Computer Self Efficacy (SCT). Perceived Compatibility (IDT). Perceived Image (IDT). Perceived Ability to Use (TAM, MPCU). Perceived Information Quality (D&M). Perceived Functional Benefit (TAM, IDT). Perceived Uncertainty (SCT, TRUST). Perceived Security (SCT, TRUST). Perceived Privacy (SCT, TRUST). Perceived Service Response (SCT, MPCU). Perceived Trust. Perceived Awareness. Multilingual Option.</i>
18	Extended IS Success Model (D&M Model 2)	<i>Attitude diadopsi (TRA / TPB). System quality (D&M). Top management support. User</i>

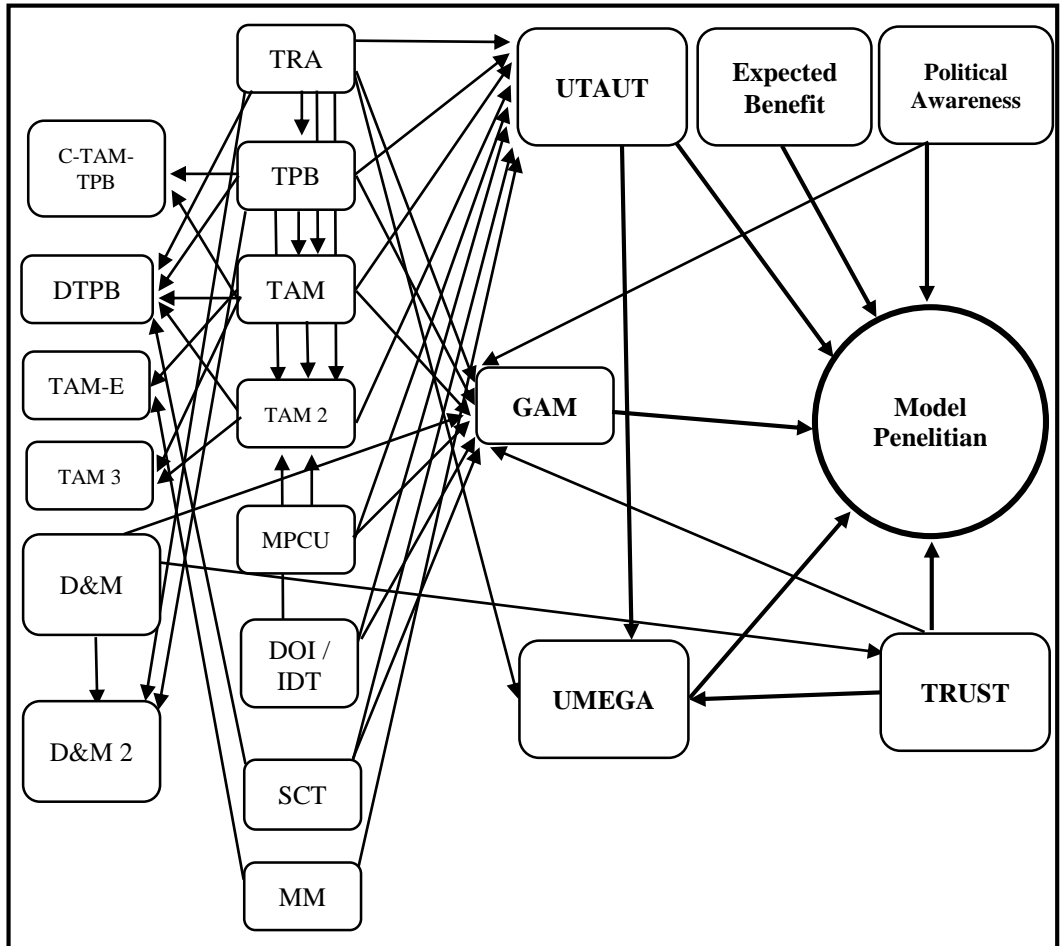
NO	TEORI / MODEL	<i>CONSTRUCT – (adopsi / modifikasi / sintesa dari)</i>
		<i>experience. User participation. User training. User satisfaction. System use.</i>
19	Trust in e-Government (TieG)	<i>Trust in Government. Trust in Technology. Quality Information. Familiarity with Internet. Privacy and Security Concern.</i>
20	Political Awareness	<i>Political Awareness.</i>
21	Expected Benefit	<i>Expected Benefit.</i>

Sumber :

Diambil dari beberapa artikel (Zaller 1990; Li 2010; Kurfalı et al. 2017; Venkatesh et al. 2003a; Dwivedi et al. 2017; Lean 2008; Korpelainen 2011; Venkatesh, Thong, dan Xu 2012; Rana et al. 2012; Lai 2017; Shareef et al. 2011; Kuo 2012).

Beberapa teori *e-government adoption* yang ada dianggap belum stabil, tidak konsisten, serupa satu dengan yang lain bahkan beberapa diantaranya saling bertolak belakang (Gregor, 2012). Senada dengan yang disampaikan Gregor, Dwivedi (2017) berpendapat bahwa beberapa teori yang ada, dinilai masih menyulitkan bagi para pengambil kebijakan maupun peneliti untuk memilih teori mana yang paling kompatibel. Dengan kata lain sampai sejauh ini belum ada teori *e-government adoption* yang

dianggap mumpuni dan oleh karena itu peluang untuk memodifikasi atau mengembangkan masih sangat terbuka.



Gambar 1. 2 Hubungan Antar Model

Hubungan antar model dapat dilihat pada Gambar 1.2. Hubungan antar model bukan hubungan sebab akibat, namun hubungan karena terdapat kemiripan atau duplikasi variabel antara model yang satu dengan lainnya sebagaimana di jelaskan pada table 1.2.

Penulis akan menggunakan modifikasi dan sintesa dari beberapa model yang bersifat *unified theory* seperti UTAUT (Venkatesh et al. 2003), UMEGA (Dwivedi et al. 2017), ditambah *Trust* (Abu-shanab 2014; Shareef dan Dwivedi 2011), *Expected Benefit* (Kuo 2012) dan *Political Awareness* (Zaller 1990). Adapun variabel yang akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap *behavioral intention (BI)* antara lain *Expected Benefit (EB)*, *Complexity of Use (CU)*, *Social Influence (SI)*, *Supporting Factor (SF)*, *Trust* dan *Political Awareness (PA)*. Menurut Shareef dan Dwivedi (2011) terdapat beberapa perspektif dalam melihat *e-government adoption* antara lain yaitu perspektif perilaku, organisasi, teknologi, sosial, pemasaran, budaya, ekonomi dan politik. Kedelapan perspektif tersebut saling berhubungan.

Meskipun demikian pada tulisan ini akan lebih ditekankan pada perspektif perilaku (*Behavioral*).

Dari paparan diatas terdapat beberapa problem akademik dan *research gap* yang dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Adanya ambivalensi dalam pemanfaatan ICT untuk kepentingan ekonomi, keuangan, pemerintahan dan interaksi sosial dengan kepentingan tata kelola pemilu, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan Sidalih.
- b. Pengguna Internet di Indonesia adalah 51% dari jumlah populasi. Dan lebih dari separohnya berada di usia muda antara range 17 – 44 tahun, yang sudah memiliki hak pilih.
- c. Jumlah studi tentang perilaku pemilih terhadap pemanfaatan sistem informasi yang berkaitan dengan pemilu khususnya Sidalih masih terbatas.
- d. Jumlah studi *non-user behavior* baik di dibidang e-government secara umum maupun di bidang kepemiluan masih relatif terbatas.

- e. Belum adanya teori *E-government adoption* yang dianggap stabil dan konsisten.

Oleh karena itu berdasarkan poin a,b,c,d,e penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Bantul.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Behavioral Intention to Use Sidalih*, antara lain :

1. Apakah *Expected Benefit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Behavioral Intention to Use Sidalih*?
2. Apakah *Complexity of Use* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Behavioral Intention to Use Sidalih*?

3. Apakah *Social Influence* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Behavioral Intention to Use Sidalih*?
4. Apakah *Trust Factor* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Behavioral Intention to Use Sidalih*?
5. Apakah *Political Awareness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Behavioral Intention to Use Sidalih*?
6. Apakah *Supporting Factor* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Behavioral Intention to Use Sidalih*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Behavioral Intention to Use Sidalih*, antara lain ::

1. Menganalisis pengaruh *Expected Benefit* terhadap *Behavioral Intention to Use Sidalih*.